

PENGARUH *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* DAN PERILAKU KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN DANA DESA: STUDI KASUS DI DESA BOTO, KECAMATAN BANCAN, KABUPATEN SEMARANG

Amalia Eli Safitri¹, Joko Pramomo², Ambar Istiyani³

¹Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA

²Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA

³Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA

e-mail: amalialisafitri0@gmail.com¹, jokopramono@stieama.ac.id², ambar@stieama.ac.id³

INFORMASI ARTIKEL

Received : Januari, 2023

Accepted : April, 2023

Publish online : April, 2023

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of Good Government Governance, namely the variables of Transparency, Accountability, Participation, and the Rule of Law, as well as the Village Head's Leadership Behavior on the performance of village fund management in Boto Village, Kec. Bancak, Kab. Semarang. This type of study is explanatory research with a quantitative approach. Primary data was obtained by distributing questionnaires to respondents, and secondary data were obtained from administrative records of the Boto Village Government. The population and sample in this study were 60 respondents. The results of the analysis of each variable show that partially, the variables of accountability, the rule of law, and the leadership behavior of the village head have a significant effect on the performance of village fund management. In contrast, the variables of transparency and community participation partially have an insignificant impact on the performance of village fund management. Then, simultaneously transparency, accountability, community participation, the rule of law, and leadership behavior significantly affect the performance of managing village funds. To improve village fund management performance, the village government needs to update village profiles, update and report village finances through digital media, increase the capacity of state apparatus in managing village funds, increase adherence to operational standards and existing rules, and village heads need to supervise the Public. In addition, future researchers should add other independent variables such as effectiveness and efficiency, consensus orientation, equity, and inclusiveness.

Key words: Good government governance, village head leadership behavior, management of village funds.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *Good Government Governance* yaitu variabel Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, dan *Rule of law*, serta Perilaku Kepemimpinan kepala desa terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Desa Boto, Kec. Bancak, Kab. Semarang. Tipe

penelitian ini adalah penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Data primer diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada responden dan data sekunder diperoleh dari catatan administrasi Pemerintah Desa Boto. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 60 responden. Hasil analisis setiap variabel menunjukkan bahwa secara parsial variabel akuntabilitas, *rule of law* dan perilaku kepemimpinan kepala desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa, sedangkan variabel transparansi dan partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Kemudian, secara simultan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, *rule of law*, dan perilaku kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dana desa, pemerintah desa perlu melakukan pembaruan profil desa, pemutakhiran dan pelaporan keuangan desa melalui media digital, meningkatkan kapasitas aparatur negara dalam mengelola dana desa, peningkatan ketaatan terhadap standar operasional dan aturan yang ada, dan kepala desa perlu melakukan supervisi dengan masyarakat. Selain itu, untuk peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel independen lain seperti efektifitas dan efisiensi, *consensus orientation*, *equitability*, dan *inclusiveness*.

Kata Kunci: *good government governance*, perilaku kepemimpinan kepala desa, pengelolaan dana desa.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola keuangannya sendiri dengan menggunakan asas demokrasi dan peran serta masyarakat. Sementara itu, menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hayati dan kehidupan buat sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat di desa. Pembangunan desa bukan hanya perkara fisik atau infrastruktur saja, pembangunan yang dimaksudkan merupakan pembangunan yang bisa berdampak dalam semua aspek pada masyarakat yaitu sosial, ekonomi, budaya, aturan dan kemananan. Oleh sebab itu, program Dana Desa diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk pembangunan di tingkat desa. Dana Desa adalah salah satu sumber pendapatan dari desa yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan ke desa sebesar 10% dengan memperhitungkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah serta tingkat kesulitan wilayah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemakmuran maupun pemerataan pembangunan di wilayah desa (Bastian, 2018).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 mengenai Pengelolaan Dana Desa, program Dana Desa

diharapkan dapat mendukung tata pengelolaan pemerintahan daerah yang baik serta mampu memberdayakan masyarakat desa (Setiawan, 2022). Sementara itu, kualitas kinerja pengelolaan dana desa dapat terjadi apabila sistem pemerintahan tertata dengan baik (*Good Government Governance*). Dengan dengan berbagai prinsip dasar dan standar pengelolaan mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan serta pelaksanaan yang sesuai tugas dan tanggung jawab pengelola, Dana Desa dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

Good governance merupakan kesepakatan terhadap peraturan negara yang disusun bersama oleh pemerintah, masyarakat dan swasta agar tercipta pemerintahan yang baik secara menyeluruh (DASAR & KEGURUAN, 2002). Dalam penerapan *Good Governance*, perlu diperhatikan beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut United Nations Development Program (UNDP) ada beberapa prinsip dasar dalam tata kelola yang baik, khususnya di sektor pemerintahan (*Good Government Governance*). Dari beberapa prinsip tersebut, (Afandi, 2019; Sedarmayanti, 2004) menyebutkan bahwa terdapat empat hal pokok yang menjadi prinsip dasar *Good Governance* di sektor pemerintahan, yaitu transparansi,

akuntabilitas, partisipasi, dan *rule of law* (supremasi hukum).

Dalam pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa (Kades) adalah pelaksana kebijakan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan penggunaan Dana Desa. Kepala desa memanfaatkan Dana Desa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) melalui Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang dalam pelaksanaannya melibatkan Perangkat Desa dan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai pengaruh *good governance* terhadap kinerja pengelolaan dana desa atau alokasi dana desa (Budiati et al., 2020; Rijal et al., 2021; Yanto & Aqfir, 2021). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum melibatkan perilaku kepemimpinan kepala desa sebagai salah satu variabel yang dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan dana desa. Sementara itu, penelitian (Laya, 2021) telah mempertimbangkan perilaku kepemimpinan kepala desa dalam kinerja pengelolaan dana desa. Namun, penelitian tersebut tidak melibatkan prinsip-prinsip dasar *good government governance*. Oleh sebab itu, penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana pengaruh *good government governance* dan perilaku kepemimpinan kepala desa terhadap pengelolaan dana desa, dengan mengambil studi kasus di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang.

LITERATUR REVIEW

Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Kinerja ialah singkatan dari kinetika energi kerja yang atau *performance* dalam pandangan Bahasa Inggrisnya. Kinerja pengelolaan dana desa adalah penerapan keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan, yang memberikan kontribusi atau nilai terhadap tujuan, program kegiatan atau pengambilan keputusan dalam mewujudkan sasaran, fungsi, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam suatu program yang strategis dalam organisasi (Harahap et al., 2020). Kinerja pengelolaan dana desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparatur desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan kegiatan, penyusunan laporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Indikator dalam mengukur kinerja pengelolaan dana desa menurut Mardiasmo dalam

Harahap, Junita, and Meutia, (2020) dalam pengukuran kinerja pengelolaan dana desa, adalah:

1. Efisiensi, merupakan perbandingan dari input dengan output yang dikaitkan dengan target serta memiliki standar kinerja yang sudah ditetapkan.
2. Efektivitas, merupakan perbandingan hasil program dengan target dari program tersebut.
3. Ekonomis, merupakan perbandingan antara input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter.

Good Government Governance

Good governance adalah tata kelola pemerintahan yang meliputi seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat menyampaikan kepentingannya, memaknai hak hukumnya, memenuhi kewajibannya, serta menghubungkan perbedaan-perbedaan antara mereka (Suhendar, 2016). Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat melindungi dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Apabila prinsip-prinsip *good governance* tersebut dapat diaplikasikan dengan seimbang, maka organisasi di sektor publik dapat lebih mudah menjalankan pemerintahan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik (Sunardi et al., 2019).

Good government governance adalah bentuk aplikasi dari prinsip-prinsip *good governance* di bidang perlakuan pemerintahan (*government actions*) secara luas di semua level (Afandi, 2019). Adapun prinsip-prinsip utama *good governance* dalam sektor pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Transparansi

Transparansi berasal dari kata *transparent* yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi ialah prinsip yang memungkinkan setiap individu secara bebas mengakses informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, antara lain informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Sapti, 2019).

Menurut (Mardiasmo, 2006) transparansi adalah bagaimana pemerintah dapat terbuka dalam menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan pengelolaan sumber daya publiknya. Transparansi adalah prinsip atau konsep yang mendorong keterbukaan dan kejujuran dalam penyajian informasi dari awal hingga akhir proses pengelolaan sumber daya serta hasil yang dicapai. Konsep transparansi didasarkan pada gagasan bahwa prinsipal harus dapat

mempelajari tentang tanggung jawab agen atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka secara terbuka (Agustan, 2018).

Transparansi dibangun berdasarkan informasi yang terbuka baik keuangan maupun kebijakan dalam setiap prosesnya baik dari pemerintah maupun lembaga-lembaga yang berkepentingan dengan informasi yang jelas dan dapat dipahami agar mudah dipantau sehingga seluruh rangkaian kebijakan dapat sesuai dengan apa yang diinginkan (Priyono et al., 2019).

Adapun indikator transparansi menurut (Sapti, 2019) adalah sebagai berikut:

- a. Keterbukaan informasi
- b. Keputusan melibatkan masyarakat
- c. Menampung aspirasi masyarakat

2. Akuntabilitas

(Mardiasmo, 2006) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban pihak yang diberi amanah (*agent*) untuk mempertanggungjawabkan dan mengungkapkan seluruh kegiatan sesuai tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan amanah (*principal*) karena memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban dari para *agent*. Lembaga-lembaga pemerintahan dan para aparatur negara harus dapat memberikan tanggungjawabnya terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing. Menurut (Mardiasmo, 2006) indikator akuntabilitas ialah:

- a. Akuntabilitas kejujuran dengan berperilaku jujur dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Akuntabilitas manajerial yakni pertanggungjawaban lembaga di sektor publik untuk mengelola organisasi dengan cara yang efektif dan efisien.
- c. Akuntabilitas program yaitu apakah suatu program dapat tercapai sesuai dengan penyusunannya.
- d. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung jawaban publik atas kebijakan yang telah diambil.
- e. Akuntabilitas finansial terkait dengan petanggung jawaban lembaga-lembaga untuk menggunakan uang publik secara ekonomi.

3. Partisipasi

Partisipasi, artinya setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun dipimpin oleh seorang wakil lembaga, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-

masing (Mardiasmo, 2006). Apabila dikaitkan dengan pembangunan desa, partisipasi masyarakat sangat diperlukan guna ketepatan dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah. Apabila masyarakat tidak aktif dalam menyampaikan aspirasinya maka pembangunan yang dilakukan disuatu wilayah akan terhambat dan tidak merata (Yanto & Aqfir, 2021).

Indikator partisipasi masyarakat menurut Hassanin Supervised dalam (Ardianti, 2019), ialah:

- a. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- b. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
- c. Masyarakat menggunakan dan memanfaatkan hasil pembangunan
- d. Kesempatan masyarakat untuk melakukan pengawasan.

4. Rule of Law (supremasi hukum)

Menurut UNDP *Rule of law* adalah prinsip aturan dan ketertiban dalam kerangka anggaran mayoritas. Taat pada aturan (*rule of law*) dalam pemerintahan yang baik mempunyai ciri berupa jaminan terhadap kepastian aturan hukum serta rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh (Afandi, 2019). *Rule of Law* merupakan bagian yang penting dalam suatu organisasi. Setiap warga Negara tidak akan dibayangi rasa takut akan ancaman bahaya kesewenang-wenangan dengan ditegakkannya kaidah atau norma hukum sehingga dapat memberikan kenyamanan berupa perlindungan dan petunjuk bagi warga masyarakat atau organisasi (Sujono, 2019).

Indikator *rule of law* menurut (Sujono, 2019) adalah sebagai berikut:

- a. Adanya peraturan perundang -undangan yang tegas dan konsisten.
- b. Adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.
- c. Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum.
- d. Adanya kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum (Sujono, 2019)

Perilaku Kepemimpinan Kepala Desa

Menurut (Zainal et al., 2017) perilaku kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya. Perilaku kepemimpinan mencerminkan kombinasi antara falsafah, keterampilan, sifat, sekaligus sikap yang mendasari perilaku seseorang pemimpin.

Indikator perilaku kepemimpinan menurut Sanusi dalam (Sutikno, 2016) indikatornya ialah:

1. Direktif, yakni kemampuan untuk mendorong para bawahannya menggunakan daya pikirnya dan daya kognitifnya dalam menghadapi masalah dan mencari pemecahan masalah yang dihadapinya.
2. Supportif, kemampuan dalam memberikan dorongan terhadap bawahannya dengan mendukung dan memberikan motivasi terhadap bawahannya.
3. Partisipatif, pemimpin dan bawahannya sama-sama terlibat dalam proses pengambilan keputusan serta pemecahan masalahnya.
4. Kepemimpinan berorientasi terhadap Prestasi, mendorong bawahannya menggunakan inovasi dan kreatifitas dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat berkembang dan berprestasi.

Dalam pengelolaan keuangan desa pemerintah melakukan *controlling* dan pengawasan alur dalam pengelolaan keuangan desa terkait dengan Dana Desa. Maka dari itu Kepala desa bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan Dana Desa berdasarkan prosedur yang disetujui oleh Pemerintah Pusat.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian eksplanatori, yaitu penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan atau pengaruh satu variabel terhadap yang lain (Sugiono, 2013). Bentuk pengaruh variabel satu dengan variabel lainnya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengaruh *good governance*, dan perilaku kepemimpinan (variabel independen) terhadap kinerja pengelolaan dana desa (variabel dependen).

Populasi penelitian ini merupakan seluruh perangkat desa yang terlibat pada pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitian ini unit analisis yang diteliti merupakan perangkat desa yang memiliki hak serta kewajiban pada proses pengelolaan keuangan desa yang terdiri menurut kepala desa, sekretaris desa, bendahara, pelaksana aktivitas pembangunan, pelaksana aktivitas pemerintahan, kepala tim pengelola aktivitas beserta tim

penggerak kesejahteraan keluarga (RT/RW) sebanyak 60 orang. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah seluruh populasi, sehingga sampel pada penelitian ini merupakan sampel jenuh.

Adapun hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh signifikan transparansi terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Desa Boto.

H2: Terdapat pengaruh signifikan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Desa Boto.

H3: Terdapat pengaruh signifikan partisipasi masyarakat terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Desa Boto.

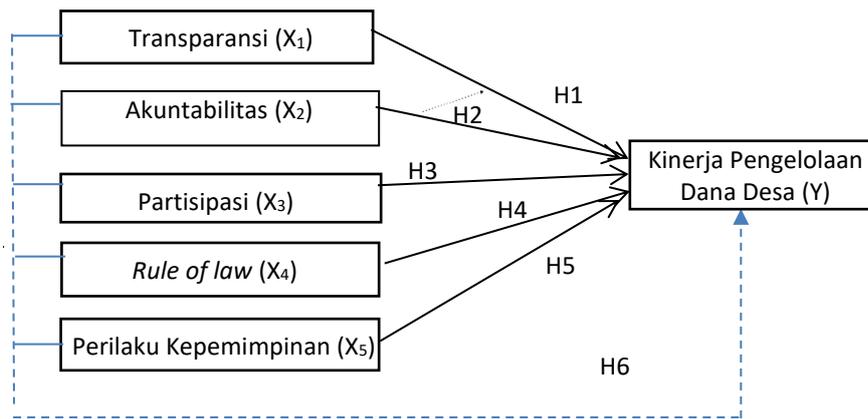
H4: Terdapat pengaruh signifikan *Rule of law* terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Desa Boto.

H5: Terdapat pengaruh signifikan perilaku kepemimpinan Kepala Desa terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Desa Boto.

H6: Terdapat pengaruh signifikan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan *Rule of law* serta perilaku kepemimpinan kepala desa secara simultan terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Desa Boto.

Teknik pengumpulan data utamanya dilakukan dengan survei menggunakan kuesioner, selain juga melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Data kemudian diolah dengan teknik analisis kuantitatif menggunakan statistik deskriptif melalui bantuan *statistical package for social sciences (SPSS)*. Kuesioner diukur menggunakan validitas dan reliabilitas. Sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap dependen, data dianalisis menggunakan analisis linier berganda. Selain itu, dilakukan uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel secara parsial, dan uji f untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

Adapun model penelitian dapat dirumuskan dalam Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1.
Model Kerangka Penelitian

Keterangan :

- ▶ = Pengaruh simultan
- - -▶ = Pengaruh parsial

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data/Hasil

Data primer diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada responden di Desa Boto dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun 2022-2023. Pembagian kuesioner dilaksanakan pada bulan September 2022. Jumlah responden sebanyak 60 orang yang merupakan perangkat desa, RT/RW, anggota PKK, Linmas, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan masyarakat Desa Boto. Responden didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 35 responden atau 58,3 persen dan 21 responden responden perempuan atau 35 persen. Dari segi usia, umur mayoritas

responden didominasi oleh usia 42 - 50 tahun dengan jumlah 21 responden (35%), sedangkan minoritas responden berusia > 61 tahun, 32-40 tahun, dan 42-50 tahun dengan 1 responden (1,7%). Sedangkan dari jenjang pendidikan terakhir yang pernah ditempuh, mayoritas pendidikan responden didominasi lulusan SLTA dengan jumlah 26 responden (43%), sedangkan sisanya berpendidikan SD (5 responden), SMP (17 responden), Diploma (3 responden), dan S1 (9 responden).

Berikut ini adalah hasil analisis data yang diperoleh menggunakan alat bantu SPSS *for windows*.

Tabel 1: Hasil Uji Validitas
[Sumber: Data primer yang diolah, 2022]

Variabel	Indikator	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
Kinerja pengelolaan dana desa (Y)	Y1.1	0,900	0,254	Valid
	Y1.2	0,936	0,254	Valid
	Y1.3	0,932	0,254	Valid
Transparansi (X ₁)	X1.1	0,912	0,254	Valid
	X1.2	0,911	0,254	Valid
	X1.3	0,943	0,254	Valid
Akuntabilitas (X ₂)	X2.1	0,855	0,254	Valid
	X2.2	0,873	0,254	Valid
	X2.3	0,872	0,254	Valid
	X2.4	0,879	0,254	Valid
	X2.5	0,843	0,254	Valid

Variabel	Indikator	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
Partisipasi masyarakat (X3)	X3.1	0,916	0,254	Valid
	X3.2	0,951	0,254	Valid
	X3.3	0,890	0,254	Valid
	X3.4	0,881	0,254	Valid
Rule of law (X4)	X4.1	0,840	0,254	Valid
	X4.2	0,933	0,254	Valid
	X4.3	0,915	0,254	Valid
	X4.4	0,913	0,254	Valid
Perilaku kepemimpinan kepala desa (X5)	X5.1	0,931	0,254	Valid
	X5.2	0,904	0,254	Valid
	X5.3	0,924	0,254	Valid
	X5.4	0,886	0,254	Valid

Tabel 2: Hasil Uji Reliabilitas

[Sumber: Data primer yang diolah, 2022]

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Alpha Pembanding	Keterangan
1	Transparansi	0,912	0,7	Reliabel
2	Akuntabilitas	0,915	0,7	Reliabel
3	Partisipasi masyarakat	0,930	0,7	Reliabel
4	Rule of law	0,922	0,7	Reliabel
5	Perilaku kepemimpinan	0,932	0,7	Reliabel
6	Kinerja pengelolaan dana desa	0,913	0,7	Reliabel

Tabel 3: Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Dan Uji T

[Sumber: Data primer yang diolah, 2022]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.232	.785		-.296	.768
	Transparansi	.069	.140	.068	.490	.626
	Akuntabilitas	.169	.074	.250	2.285	.026
	Partisipasi Masyarakat	-.019	.112	-.024	-.167	.868
	Rule of Law	.299	.101	.394	2.975	.004
	Perilaku kepemimpinan kepala desa	.222	.080	.296	2.763	.008

a. Dependent Variable : Kinerja pengelolaan dana desa

Tabel 4: Hasil Uji F

[Sumber: Data primer yang diolah, 2022]

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	87.951	5	17.590	43.877	.000 ^a
Residual	21.649	54	.401		
Total	109.600	59			

a. *Predictors:* (Constant), Perilaku Kepemimpinan, Akuntabilitas, Rule of Law, Transparansi, Partisipasi Masyarakat

b. *Dependent Variable:* Kinerja pengelolaan dana desa

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Tabel 5: Koefisien Determinasi

[Sumber: Data primer yang diolah, 2022]

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.896 ^a	.802	.784	.633

a. *Predictors:* (Constant), Perilaku kepemimpinan kepala desa, Akuntabilitas, Rule of Law, Transparansi, Partisipasi Masyarakat

b. *Dependent Variable:* Kinerja pengelolaan dana desa

Pembahasan

1. Hasil Uji Validitas

Dalam penelitian ini pengambilan keputusan valid tidaknya indikator masing-masing variabel penelitian dilakukan dengan ketentuan jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka butir pernyataan dikatakan valid, sebaliknya jika nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka butir pernyataan dikatakan tidak valid. Pada kasus ini jumlah sampel (n) = 60 sehingga r_{tabel} $df = n - 2$ ($60 - 2 = 58$) dan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ diperoleh $r_{tabel} = 0,254$. Berikut hasil uji validitas masing-masing pernyataan dapat dilihat pada Tabel 1 di atas.

Berdasarkan Tabel 1 hasil pengujian validitas tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai r_{hitung} instrumen berada pada kisaran 0,840 s/d 0,951, sedang nilai $n = 60$ dan r_{tabel} nya = 0,254 ($\alpha = 5\%$, $df = n - 2$, $60 - 2 = 58$), sehingga dapat dikatakan jika nilai r_{hitung} masing-masing instrumen $> r_{tabel}$ (0,254), maka masing-masing instrumen dapat dikatakan valid. Dapat dikemukakan bahwa butir pernyataan tiap-tiap variabel penelitian layak digunakan sebagai instrumen dalam penggalan data di lapangan.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten atau tetap asas bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Dalam penelitian ini untuk mengetahui hasil pengukuran konsisten atau reliabel digunakan alat analisis *scale*,

yang ditunjukkan oleh nilai *cronbach alpha* $> 0,7$ (Ghozali, 2016).

Hasil penelitian pengujian reliabilitas ini dibantu oleh program SPSS dapat dilihat dalam Tabel 2. Dari tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai *Cronbach Alpha* masing-masing variabel penelitian berada pada kisaran 0,912 s/d 0,932 sehingga $> Alpha$ pembandingan (0,7), untuk itu berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan, maka kuesioner penelitian dapat dikatakan reliabel, artinya kuesioner yang digunakan dapat dikatakan dipercaya sebagai alat pengumpulan data.

3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda dan Uji t

Berdasarkan analisis dengan program SPSS For Windows diperoleh hasil regresi berganda seperti terangkum pada Tabel 3. Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan persamaan regresi linier bergandanya sebagai berikut:

$$Y = -0,232 + 0,069 X_1 + 0,169 X_2 - 0,019 X_3 + 0,299 X_4 + 0,222 X_5$$

Dalam persamaan di atas nilai konstanta (a) sebesar -0,232 yang berarti bahwa jika variabel transparansi (X_1), akuntabilitas (X_2), partisipasi masyarakat (X_3), rule of law (X_4), dan perilaku kepemimpinan (X_5) tidak mengalami perubahan atau sebesar nol (0) maka besarnya variabel kinerja pengelolaan dana desa akan turun sebesar 0,232. Persamaan tersebut juga menunjukkan bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja

pengelolaan dana desa di Desa Boto adalah variabel *Rule of Law* (X4).

Sementara itu, hasil uji t pengaruh transparansi terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Desa Boto, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,490 dan t_{tabel} (2,005) dengan signifikansi sebesar $0,626 > 0,05$ sedangkan perbandingan kedua nilai t tersebut menunjukkan, nilai t_{hitung} (0,490) < t_{tabel} (2,005), maka pernyataan hipotesis I penelitian, "Terdapat pengaruh signifikan dari variabel transparansi terhadap kinerja pengelolaan dana desa di desa Boto" **ditolak**. Hal tersebut terjadi antara lain karena pemasangan baliho sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa kurang efektif karena minat baca masyarakat masih rendah. Serta kunjungan tilik dusun Kepala Desa sebagai upaya penyampaian secara langsung masih kurang karena jarak pertemuan dengan warga satu tahun sekali maka langkah tersebut kurang efektif sebagai bentuk transparansi pengelolaan dana desa di Desa Boto.

Hasil analisis pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Desa Boto diperoleh nilai t_{hitung} 2,285 dan nilai t_{tabel} (2,005), dengan nilai signifikansi $0,026 < 0,05$ sedangkan perbandingan kedua nilai t tersebut menunjukkan, nilai t_{hitung} (2,285) > t_{tabel} (2,005), maka pernyataan hipotesis II penelitian, "Terdapat pengaruh signifikan dari variabel akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Desa Boto", dapat **diterima**.

Hasil analisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Desa Boto diperoleh nilai t_{hitung} (-0,167) dan < t_{tabel} (2,005), dengan nilai signifikansi $0,868 > 0,05$ maka perbandingan kedua nilai t tersebut menunjukkan, nilai t_{hitung} (-0,167) < t_{tabel} (2,005), maka hipotesis III penelitian, "Terdapat pengaruh signifikan dari variabel akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Desa Boto" **ditolak**. Hal ini dapat terjadi dimungkinkan karena semakin banyaknya partisipasi dari masyarakat di Desa boto yang terlibat baik dari segi perencanaan dan juga pelaksanaan program dana desa, maka akan semakin lama proses pengambilan keputusan karena banyaknya suara dan masukan dari masyarakat. Sehingga bisa memicu terhambatnya proses pelaksanaan program dana desa.

Hasil analisis pengaruh *rule of law* terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Desa Boto diperoleh nilai t_{hitung} 2,975 dan t_{tabel} (2,005), sedangkan nilai signifikansi $0,004 < 0,05$. Perbandingan kedua nilai t tersebut menunjukkan, nilai t_{hitung} (2,975) > t_{tabel} (2,005), maka pernyataan hipotesis IV, "Terdapat pengaruh signifikan variabel

rule of law terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Desa Boto, Kab.Semarang" **diterima**.

Hasil analisis pengaruh perilaku kepemimpinan kepala desa terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Desa Boto diperoleh nilai t_{hitung} 2,763 dan t_{tabel} (2,005), nilai signifikansi $0,008 > 0,05$ sedangkan perbandingan kedua nilai t tersebut menunjukkan, nilai t_{hitung} (2,763) > t_{tabel} (2,005), maka pernyataan hipotesis V penelitian, "Terdapat pengaruh signifikan dari variabel perilaku kepemimpinan terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Desa Boto, Kab. Semarang", dapat **diterima**.

4. Hasil Uji F

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2011:98). Hal tersebut ditampilkan dalam Tabel 4 di bawah.

Pada Tabel 4 di atas diperoleh nilai $f = 43,877$ dan $sig = 0,000 < 5\%$. Ini berarti variabel independen transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, *rule of law*, dan perilaku kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Sedangkan nilai F_{tabel} pada $df_1=5$, $df_2=54$, dan *level of significant* (α) 5% sebesar (2,39) Perbandingan kedua nilai F tersebut menunjukkan, nilai F_{hitung} (43,877) > F_{tabel} (2,39), sehingga variabel transparansi (X_1), akuntabilitas (X_2), partisipasi masyarakat (X_3), *rule of law* (X_4), dan perilaku kepemimpinan (X_5) berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa (Y). Maka pernyataan Hipotesis VI, "Terdapat pengaruh signifikan variabel transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, *rule of law*, dan perilaku kepemimpinan terhadap kinerja pengelolaan dana desa di desa Boto" **diterima**.

5. Koefisien Determinasi

Tabel 5 di bawah ini menunjukkan bahwa besarnya nilai koefisien determinasi ditunjukkan oleh *Adjusted R Square* sebesar 0,784. Hal tersebut dapat diartikan variasi pada variabel kinerja keuangan dana desa dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang berupa variabel transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, *rule of law*, dan perilaku kepemimpinan kepala desa 78,4% sedangkan sisanya 21,6% (100% - 78,4%) dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalnya : efektifitas dan efisiensi, *consensus orientation*, *equitability*, dan *inclusiveness*.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan penelitian mengenai pengaruh *good government governance* dan perilaku kepemimpinan kepala desa terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Desa Boto, maka dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, variabel transparansi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Desa Boto. *Kedua*, variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Desa Boto. *Ketiga*, variabel partisipasi masyarakat berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Desa Boto. *Keempat*, variabel *rule of law* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Desa Boto. *Kelima*, Variabel perilaku kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Desa Boto. *Keenam*, variabel transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, *rule of law*, dan perilaku kepemimpinan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Desa Boto.

Ada beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan demi terwujudnya kinerja pengelolaan dana desa yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat desa. *Pertama*, perlunya peningkatan transparansi sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan dana desa Di Desa Boto berupa pembaruan profil desa dan alokasi dana desa sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses melalui media digital. *Kedua*, Pemerintah Desa Boto perlu melakukan pemutakhiran pengelolaan pembukuan pengelolaan dana desa agar data yang disajikan kepada masyarakat lebih akurat. *Ketiga*, Pemerintah Desa Boto lebih mendorong partisipasi masyarakat bukan hanya dalam keikutsertaan dalam pembangunan fisik namun juga aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Keempat, dalam menjalankan program dana desa hendaknya pemerintah Desa Boto selalu berpedoman pada standar operasional (SOP) dan pedoman teknis pengelolaan anggaran dana serta menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kelima*, Kepala Desa perlu mengadakan supervisi dengan turun langsung ke lapangan sebagai upaya *preventive* (pencegahan) secara konsisten guna mengetahui kondisi desa Boto secara lebih nyata, agar dapat mengetahui permasalahan masyarakat lebih detail sehingga mempermudah dalam mengambil kebijakan bersama perangkat desa. *Keenam*, perlunya peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat desa dalam berbagai kegiatan peningkatan kompetensi, baik pelatihan maupun studi banding

dengan daerah lain sehingga aparat desa dalam mengelola anggaran dana desa lebih berkualitas guna mendukung produktifitas warga desa Boto.

Selain itu, untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel independen lainnya seperti efektifitas dan efisiensi, *consensus orientation, equitability, dan inclusiveness* untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dana desa dikarenakan variabel-variabel tersebut berpotensi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, P. (2019). PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP KEBERHASILAN PROGRAM DANA DESA DENGAN GOOD GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus Di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Jawa Tengah). *Among Makarti*, 12(1).
<https://doi.org/10.52353/ama.v12i1.174>
- Agustan, T. J. (2018). Pengaruh Penerapan Good Governance Pengelolaan Keuangan Kualitas Sumber Daya Manusia Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatra Utara Medan Tahun 2018-2020 Vol.4, 1*.
- Ardianti, R. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Skripsi. Semarang. UIN Walisongo*.
- Bastian, I. (2018). *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa* (S. Saat (ed.); 4th ed.).
- Budiati, Y., Sugiyanto, E. K., & Niati, A. (2020). PENGARUH GCG TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN MODERASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(4).
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i4.4127>
- DASAR, P., & KEGURUAN, P. (2002). Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. In *Deepublish*.
<http://www.fkip.unsyiah.ac.id/wp-content/uploads/2015/06/Hasil-Tes-Online-2015.pdf>
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Yogyakarta. In *Universitas Diponegoro Yogyakarta*.

- Harahap, firhan baihaqi, Junita, A., & Meutia, T. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Partisipasi masyarakat dan perilaku kepemimpinan terhadap pengelolaan dana desa dengan komitmen pada tujuan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 4(110).
- Laya, K. A. (2021). Pengaruh Regulasi , Pengawasan , Kepala Desa dan Pendamping Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bogor. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 9(1).
- Mardiasmo. (2006). Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1).
- Priyono, N., Wahyudi, M., & Prijanto, W. J. (2019). EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DI DESA PURWODADI KECAMATAN TEGALREJO KABUPATEN MAGELANG). *Among Makarti*, 11(2). <https://doi.org/10.52353/ama.v11i2.172>
- Rijal, M. S., Handajani, L., & Sakti, D. P. B. (2021). Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governace. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(12). <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i12.p20>
- Sapti, M. (2019). Konsep Transparansi. *Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi)*, 53(9).
- Sedarmayanti. (2004). Membangun sistem manajemen kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju good governance. In *Pidato Pengukuhan Guru besa di Universitas Unitono Surabaya* (p. 5).
- Setiawan, A. (2022). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen (SENAMA)*, 1(1), 169. <https://doi.org/10.52353/senama.v1i1.242>
- Sugiono. (2013). Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. In *Mode Penelitian Kualitatif*.
- Suhendar, D. (2016). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Keberhasilan Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja APBD Kabupaten/Kota Se-Wilayah III Cirebon Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderator. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 2(2). <https://doi.org/10.25134/jrka.v2i2.454>
- Sujono, I. (2019). PENEGAKAN ATURAN HUKUM (Rule of the Law). *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3455039>
- Sunardi, S., Yanti, D., & Ariansyah, W. (2019). PENGARUH PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCETERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS. *AKUNTABILITAS*, 13(2). <https://doi.org/10.29259/ja.v13i2.9516>
- Sutikno, M. S. (2016). Pemimpin dan Kepemimpinan. In *Pemimpin dan Kepemimpinan*.
- Yanto, E., & Aqfir, A. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa. *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36090/e-dj.v2i2.916>
- Zainal, R. V., Hadad, M. D., & Ramly, M. (2017). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (4th ed.). Rajawali Pers.